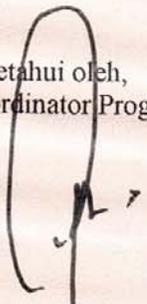


**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

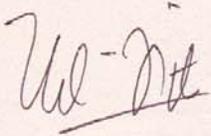
**ANALISIS KINERJA BELANJA DISBUDPAR  
KOTA BUKITTINGGI**

Nama : Zakia Muthia Ersya  
NIM : 15288  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Diketahui oleh,  
Koordinator Program Diploma III

  
Perengki Susanto, SE, M.Sc  
NIP : 19810404 200501 1 002

Padang, Januari 2014  
Disetujui oleh,  
Pembimbing

  
Nelvirita, SE, M.Sc, Ak  
NIP : 19740706 199903 2 002

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

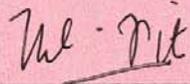
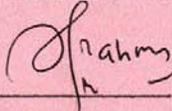
**ANALISIS KINERJA BELANJA DISBUDPAR  
KOTA BUKITTINGGI**

Nama : Zakia Muthia Ersya  
NIM : 15288  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2013

**Tim Penguji,**

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Nelvirita, SE, M.Sc, Ak	 _____
2. Anggota : Fefri Indra Arza, SE, M.Si, AK	 _____
3. Anggota : Elvi Rahmi, S.Pd, M.Pd	 _____

## **ABSTRAK**

**Zakia Muthia Ersya** : **Analisis Kinerja Belanja DISBUDPAR Kota Bukittinggi**

**Pembimbing** : **Nelvrita, SE, M.Si, Ak**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis selisih antara belanja dan anggaran serta mengetahui bagaimana peningkatan kinerja anggaran belanja DISBUDPAR Kota Bukittinggi. Penelitian ini dilakukan di DISBUDPAR Kota Bukittinggi dengan menggunakan data primer dan data skunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran DISBUDPAR Kota Bukittinggi dan buku-buku serta peraturan perundangan yang mengatur tentang Realisasi anggaran belanja daerah.

Penggunaan data dalam menganalisis adalah Anggaran Belanja Dan Realisasi Belanja DISBUDPAR Kota Bukittinggi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan rasio keuangan yang meliputi analisis pertumbuhan belanja, keserasian belanja dan efisiensi belanja.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa : a) pada tahun 2010-2012 realisasi belanja DISBUDPAR adalah 87,5%. b) Pertumbuhan belanja dari tahun 2010-2012 DISBUDPAR adalah 15,63%. c) Pada tahun 2010-2012 belanja operasi DISBUDPAR adalah 89,53%.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan Judul “Analisis Kinerja Belanja DISBUDPAR Kota Bukittinggi”. Dan Shalawat beriring salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad Sawyang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Prof. Yunia Wardi, Drs., M.Si
2. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Si, selaku Ketua Prodi D3 Fakultas Ekonomi
3. Ibu Nelvirita, SE, M.Si, AK sebagai pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Seluruh staf DISBUDPAR lainnya yang telah memberikan kesempatan membantu penulis untuk memperoleh data untuk menyusun Tugas Akhir ini.

5. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak dan Ibu Elvi Rahmi, S. Pd, M.Pd sebagai penguji, yang telah bersedia menjadi penguji, memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan tugas akhir ini
6. Ibu Salma Taqwa, SE, M. Si, sebagai Pembimbing Akademik penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen, Staf pengajar dan Karyawan program studi DIII FE UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama di perkuliahan.
8. Teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orangtua tercinta yang sangat penulis hormati serta keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa.
9. Sahabat-sahabat terdekat penulis, terimakasih atas bantuan dan semangatnya.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Semoga segala bimbingan, bantuan, motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin. Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan Tugas Akhir dimasa yang akan datang.

Padang, Maret 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori .....	7
1. Pengukuran Kinerja.....	8
a. Tujuan Pengukuran Kinerja .....	8
b. Manfaat Pengukuran Kinerja .....	9
c. Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja .....	10
d. Pelaporan Kinerja.....	12
2. Belanja Daerah .....	14

a. Klasifikasi Belanja .....	14
b. Analisis Pengukuran Kinerja Belanja .....	19
3. Laporan Realisasi Anggaran .....	21
B. Kerangka Konseptual Penelitian .....	22
C. Rasio Pengukuran Kinerja Belanja .....	23
<b>BAB III. PENDEKATAN PENELITIAN</b>	
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir .....	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
C. Rancangan Penelitian .....	24
D. Teknis Analisis Data .....	26
<b>BAB IV. HASIL PEMBAHASAN</b>	
A. Profil Perusahaan.....	28
B. Pembahasan .....	33
a. Analisis Pengukuran Kinerja.....	33
1. Analisis Kecerahan Belanja .....	35
2. Analisis Efisiensi Belanja .....	36
3. Analisis Pertumbuhan Belanja .....	37
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran .....	39

**DAFTAR PUSTAKA ..... 41**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Belanja Keserasian 2010-2012 .....	35
2	Efisiensi Belanja Tahun 2010-2012.....	36
3	Pertumbuhan belanja tahun 2010- .....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran

- 1 Laporan Realisasi Anggaran DISBUDPAR Tahun 2010-2012
- 2 Hasil Perhitungan Data
- 3 Surat Permohonan Observasi
- 4 Surat Keterangan Penelitian Pada DISBUDPAR

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tonggak sejarah reformasi manajemen keuangan daerah ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimulai 1 Januari 2001. Reformasi yang paling mendasar juga terjadi pada aspek pemerintahan, perubahan ini sering ditujukan kepada aparatur pemerintahan menyangkut prestasi kerja. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih baik, leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah tersebut pemerintah diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya dan mempertanggung jawabkan kepada masyarakat. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif, dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Menurut Mahmudi (2010:02) tujuan otonomi daerah yaitu:“Untuk meningkatkan daerah, memperbaiki transparansi, dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah”.

Pada era reformasi, belanja menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan di pemerintahan. Ketersediaan anggaran belanja

pemerintah yang sangat terbatas dan masih harus diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan, maka pengalokasian belanja harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar dapat dimanfaatkan secara efisien dan dapat menghasilkan daya ungkit yang kuat bagi pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian diperlukan siklus perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, dan pengevaluasian anggaran pengembangan pemerintahan yang baik sehingga pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, “Belanja daerah dapat didefinisikan sebagai pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah”. Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (*public fund*) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan pemerintah dan arah pembangunan daerah. Dalam organisasi menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian,

dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran, analisis terhadap kinerja belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk menjadi dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan.

Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yang bersih merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana untuk mewujudkannya memerlukan media tertentu. Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan akurat dengan anggaran menilai kondisi dan hasil operasional, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya serta membantu mengevaluasi tingkat efisien dan efektivitas.

“Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya” Bastian (2006:292). Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Analisis pengukuran kinerja belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*Value of money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Dengan digunakannya

sistem penganggaran yang berbasis kinerja, semangat untuk melakukan efisiensi atas belanja mutlak harus tertahan dalam jiwa setiap pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada *output* dan *outcome* dari anggaran.

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, pembaca laporan keuangan dapat menganalisis kinerja belanja daerah. Pengukuran kinerja belanja disini menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan belanja daerah yang terdiri dari rasio pertumbuhan belanja, analisis ini bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Analisis keserasian, rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Rasio efisiensi belanja, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Kinerja belanja sangat menentukan tercapainya sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem evaluasi dan pelaporan anggaran belanja yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan demikian dilakukannya pengukuran kinerja maka kita bisa memastikan apakah pengambilan keputusan dilakukan secara tepat dan objektif. Selain itu, kita juga bisa memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana

kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja periode berikutnya.

Kota Bukittinggi memiliki banyak objek wisata, dan seperti kita ketahui pariwisata merupakan pendapatan yang paling berpengaruh untuk Kota Bukittinggi. Objek pariwisata ini berada dibawah pengelolaan DISBUDPAR dan setiap Dinas pemerintahan yang ada dapat kita ukur kinerjanya berdasarkan penggunaan anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat satu karya ilmiah berbentuk tugas akhir dengan judul “*Analisis Kinerja Belanja DISBUDPAR Kota Bukittinggi*”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja belanja DISBUDPAR Kota Bukittinggi ditinjau dari rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, rasio efisiensi belanja, dan rasio pertumbuhan belanja”

## **C. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja realisasi anggaran belanja pada DISBUDPAR Kota Bukittinggi ditinjau dari rasio belanja daerah tahun 2010-2012.
2. Untuk menganalisis perbandingan antara anggaran dan realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran belanja DISBUDPAR Kota Bukittinggi.
3. Untuk melihat pengoptimalan penggunaan dana dari DISBUDPAR sebagai salah satu pendapatan paling besar untuk Kota Bukittinggi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan akan mendapatkan manfaat kepada:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta meningkatkan kemampuan analisis tentang pengelolaan anggaran belanja.
2. Bagi mahasiswa DIII Akuntansi dapat dijadikan acuan, pedoman, dan motivasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi Dinas yang bersangkutan, dapat dijadikan sebagai masukan sebagai bahan evaluasi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran ialah suatu proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif benda/objek, perkara, atau keadaan. Nilai kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalam suatu unit angka yang tetap dengan menggunakan alat pengukuran yang berkaitan. Menurut Deddi (2010:158) pengukuran kinerja yaitu:

“Suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan”.

Pengukuran kinerja adalah instrumen yang digunakan untuk menilai hasil akhir pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang ditetapkan sebelumnya. “Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud: (1) pengukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja (2) ukuran kinerja digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan (3) ukuran kinerja dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan” (Mahmudi, 2010:121)

“Pengukuran kinerja merupakan suatu alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas” (James B. Whittaker dalam Bastian (2001:121). Agar pengukuran kinerja dapat dilaksanakan dengan baik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: “(1) membuat suatu komitmen untuk mengukur kinerja dan memulainya dengan segera, hal yang perlu dilakukan oleh instansi adalah sesegera mungkin memulai upaya pengukuran kinerja langsung sempurna. Nantinya, perbaikan atas pengukuran kinerja yang telah disusun akan dilakukan, (2) perlakukan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan untuk selalu berupaya memperbaiki kinerja, pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang bersifat interaktif. Proses ini merupakan suatu cerminan dari upaya memperbaiki kinerja, (3) sesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi” Bastian (2006:277)

#### **a. Tujuan Pengukuran Kinerja**

Tujuan sistem pengukuran adalah untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.

Secara umum sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk:

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*Top Down dan Bottom Down*).

- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
- c. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran kinerja yang digunakan untuk pencapaian kinerja Bastian (2006:275)
- d. Untuk memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati.
- e. Memotivasi pegawai.

Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu:

1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah pada periode-periode sebelumnya Deddi (2006:159).
2. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

#### **b. Manfaat Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang banyak bagi organisasi, secara umum manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen.
- b. Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.
- d. Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada.

- e. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- f. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
- g. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.

### **c. Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja**

Menurut Indra (2006:276) setiap organisasi biasanya tertarik pada pengukuran kinerja dalam aspek berikut:

#### 1. Aspek Finansial

Aspek finansial meliputi anggaran atau *cash flow*. Aspek finansial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga kondisi keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia.

#### 2. Kepuasan Pelanggan

Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. Untuk itu, manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan mengenai tingkat kepuasan pelanggan.

#### 3. Operasi dan Bisnis Internal

Informasi operasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum dalam skema strategi.

#### 4. Kepuasan Pegawai

Dalam perusahaan yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai sungguh sangat nyata. Apabila pegawai tidak dikelola dengan baik, maka kehancuran perusahaan sulit untuk dihindari.

#### 5. Keputusan Pegawai

Pengukuran kkinerja perlu didesain untuk mengakomodasikan kepuasan dari para stakeholders.

#### 6. Waktu

Ukuran waktu juga merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam desain pengukuran kinerja, sehingga informasi yang dibutuhkan diharapkan relevan dan *up to date*.

Agar pengukuran kinerja dapat dilaksanakan dengan baik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat suatu komitmen untuk mengukur kinerja dan memulainya dengan segera.

Hal yang perlu diperhatikan oleh instansi adalah sesegera mungkin memulai upaya pengukuran kinerja dan tidak perlu mengharap pengukuran kinerja akan langsung sempurna. Nantinya perbaikan atas pengukuran kinerja yang telah disusun akan dilakukan.

2. Perlakuan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan (*on-going process*)

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang bersifat interaktif. Proses ini merupakan cerminan dari upaya organisasi untuk selalu berupaya dalam memperbaiki kinerja.

3. Sesuai proses pengukuran kinerja dengan organisasi.

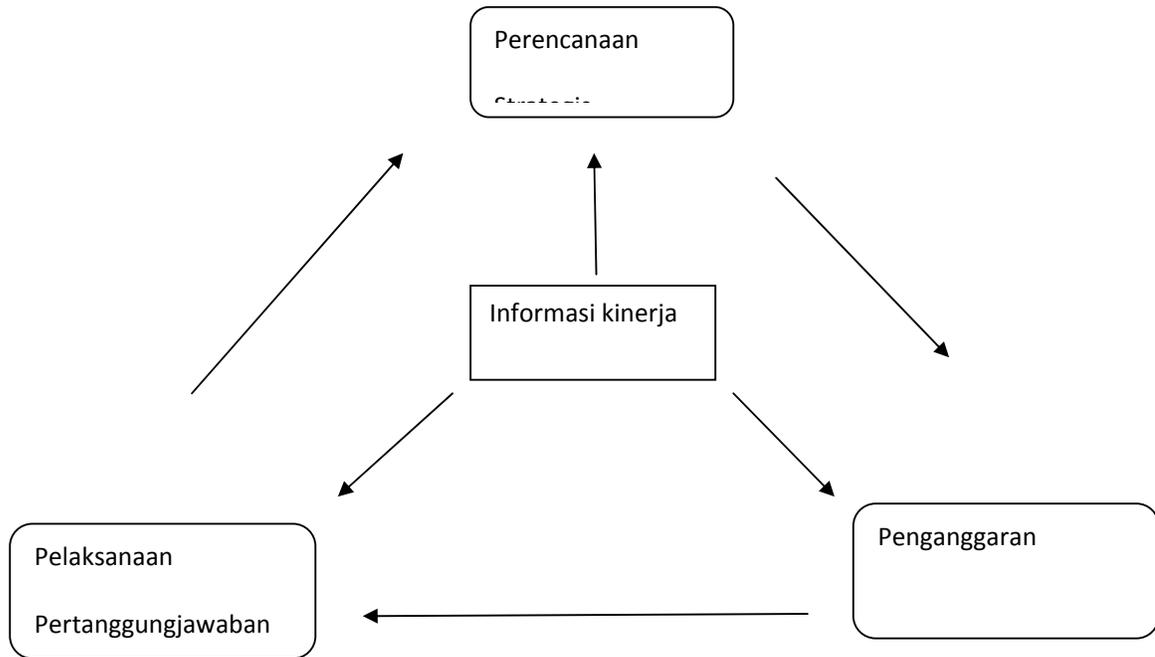
Organisasi harus menetapkan ukuran kinerja yang sesuai dengan besarnya organisasi, visi, tujuan, sasaran, dan struktur organisasi.

d. Pelaporan Kinerja

Informasi tentang kinerja menjadi informasi yang dibutuhkan di setiap fase perjalanan organisasi sektor publik dalam mencapai visi dan misinya. Dalam aspek perencanaan, informasi tentang kinerja memberikan gambaran penting dan fundamental tentang kondisi saat ini yang menjadi perencanaan. Informasi tentang kinerja juga dibutuhkan pada saat pelaksanaan kegiatan. Seperti layaknya indikator dan rambu saat berkendara, informasi kinerja berguna bagi organisasi untuk mengetahui posisi dan keberadaannya sehingga dapat mengatur strategi dan terobosan yang diperlukan.

Informasi tentang kinerja dalam bentuk laporan pertanggungjawaban menjadi informasi yang paling krusial untuk kepentingan evaluasi. Tanpa laporan kinerja dalam proses pertanggungjawaban, siklus penganggaran menjadi titik lengkap. Anggaran kinerja merencanakan uang dan kinerja. Karena itu, penggunaan uang dan pencapaian kinerja yang bersangkutan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode penganggaran.

Penjelasan di atas menunjukkan keberadaan informasi kinerja yang dibutuhkan pada berbagai fase pengelolaan organisasi sektor publik seperti ditunjukkan pada bagan berikut:



Gambar 1. Bagan Informasi Kinerja yang dibutuhkan pada berbagai fase pengelolaan organisasi sektor publik.

*Sumber: Deddi, 2007*

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintah daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan.

## **2. Belanja Daerah**

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu antara pemerintah daerah yang ditetapkan dalam ketentuan Perundang-undangan.

Menurut ulum (2005:204),“ Belanja adalah semua pengeluaran kas umum negara/kas daerah yang memngurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah pusat/daerah, belanja ditetapkan dengan dokumen otorisasi kredit anggaran (*allotment*)”.

Biaya dapat dikategorikan sebagai belanja dan beban Bastian, (2001:144). Belanja operasi meliputi pengeluaran barang dan jasa (belanja pegawai, belanja barang, belanja barang dan jasa dan lain-lain)

### **a. Klasifikasi Belanja**

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kbupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

Menurut Bastian (2001:144) “Biaya dapat dikategorikan sebagai belanja dan beban. Belanja adalah jenis biaya yang timbulnya berdampak langsung kepada berkurangnya saldo kas maupun uang entitas yang berada

di bank”. Belanja operasi meliputi pengeluaran barang dan jasa (belanja pegawai, belanja barang, belanja barang dan jasa dan lain-lain), pembayaran cicilan bunga utang, subsidi, anggaran pengeluaran sektoral (*current transfer*), sumbangan dan bantuan.

Untuk lebih menguatkan lagi secara hukum, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Pengelompokkan belanja daerah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang dituangkan dalam peraturan pemerintah PP No.24 Tahun 2005 ini meliputi:

1. Klasifikasi ekonomi, pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Klasifikasi ekonomi pada pemerintah pusat meliputi:

- a. Belanja pegawai, belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan pembentukan modal.

- b. Belanja barang, pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini digunakan untuk pengeluaran pembelian/penggunaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12(duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/ penggunaan barang dan/atau pakai jasa tersebut mencakup belanja barang habis pakai, bahan material, jasa kantor, cetak/penggunaan, sewa rumah. Sewa gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
- c. Belanja modal, pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.
- d. Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principle outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

- e. Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.
- f. Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau pemberian jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya. Hibah kepada pemerintah bertujuan di daerah, hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum, hibah kepada badan, lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- g. Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

- h. Belanja tak terduga adalah pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
2. Klasifikasi berdasarkan ekonomi, klasifikasi ini berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.
- a. Belanja untuk pemerintah pusat yaitu belanja per Kementerian Negara/Lembaga beserta unit organisasi dibawahnya.
  - b. Belanja untuk pemerintah daerah meliputi:
    - 1) Belanja sekretariat DPRD
    - 2) Sekretariat daerah Provinsi/Kota/Kabupaten
    - 3) Dinas pemerintah tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten
    - 4) Lembaga teknis daerah tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten
3. Klasifikasi menurut fungsi, klasifikasi ini didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi berdasarkan fungsi yaitu:
- a. Belanja pelayanan umum
  - b. Belanja pertahanan
  - c. Belanja ketertiban dan keamanan
  - d. Belanja ekonomi
  - e. Belanja perlindungan lingkungan hidup
  - f. Belanja perumahan dan pemukiman

- g. Belanja pariwisata dan budaya
- h. Belanja agama
- i. Belanja pendidikan

#### **b. Analisis Pengukuran Kinerja Belanja**

Analisis pengukuran kinerja belanja sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisiensi, dan efektif (*value for money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah belanja yang dianggarkan, yang hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Dalam hal belanja daerah penting juga dianalisis keserasian belanja karena hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi.

Berdasarkan informasi laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis pengukuran kinerja belanja dengan cara:

##### 1) Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja belanja bermanfaat untuk mengetahui kesinambungan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilitas. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu

membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja berupa, analisis belanja operasi dan belanja modal terhadap total belanja.

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

## 2) Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak di anggap baik untuk rasio ini, tetapi relatif. Artinya ini tidak di anggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien di banding tahun lalu. Pemerintah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka menindikasikan terjadinya pemborosan anggaran. Analisis efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan rasio berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

## 3) Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif arau negatif. Pada

umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja Tahun } t-1}{\text{Belanja Tahun } t-1} \times 100\%$$

### 3. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan menurut basis kas dan sekurang-kurangnya menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

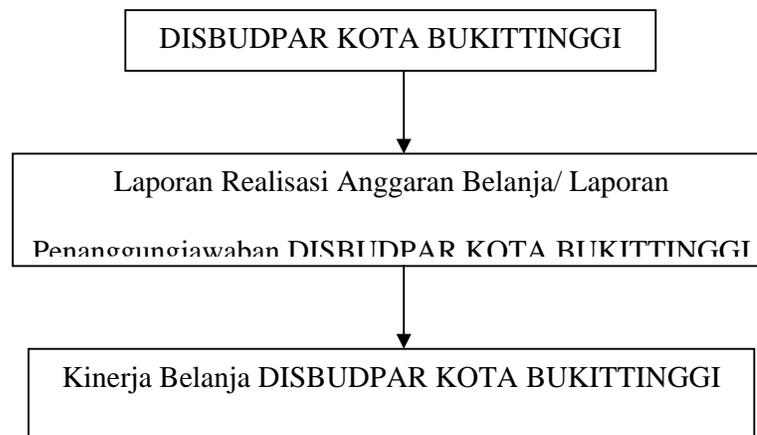
1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/defisit
5. Pembiayaan
6. Sisa lebih/kurangnya pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan belanja diklasifikasikan menurut jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Dari penjelasan mengenai laporan kinerja keuangan dan laporan realisasi anggaran dapat ditarik suatu benang merah yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi kedua jenis laporan.

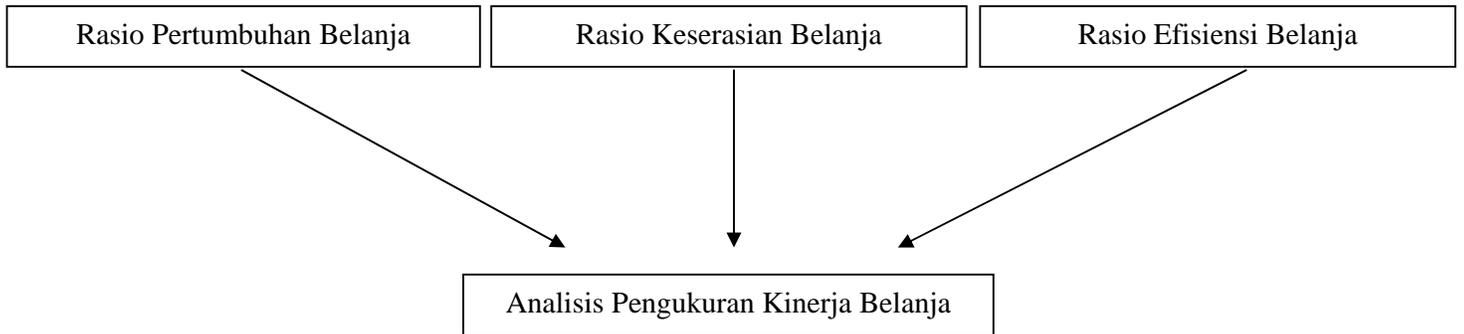
Dalam akuntansi pemerintahan yang menggunakan basis akrual, salah satu macam laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan kinerja keuangan ( *statement of financial position* ) namun, praktik yang terjadi dilingkungan pemerintahan adalah adanya keterikatan antara pelaksanaan anggaran dengan anggaran yang telah disetujui oleh legislasi. Dengan demikian, pemangku kepentingan ( *stakeholder* ) dari laporan keuangan pemerintah mungkin membutuhkan laporan yang menyajikan informasi mengenai perbandingan antara pelaksanaannya dalam tahun anggaran yang sama.

## B. Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian

### C. Rasio Pengukuran Kinerja Belanja



Gambar 3. Rasio Pengukuran Kinerja Belanja

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Sebagian besar belanja DISBUDPAR dialokasikan untuk belanja operasi yaitu sebesar 89,52%. Sedangkan rata-rata rasio belanja modal dalam penggandaan barang yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun sebesar 10,5%
2. Efisiensi belanja DISBUDPAR menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata sebesar 15,63% dan pertumbuhannya fluktuatif.
3. Kinerja belanja DISBUDPAR Kota Bukittinggi dapat dilihat dari analisis pertumbuhan secara umum kinerja DISBUDPAR dapat dikatakan baik karena dari tahun 2010-2012 realisasi belanja tidak ada yang melebihi yang dianggarkan dimana dari tahun 2010-2012 memiliki rata-rata sebesar 87,5%

#### **F. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi DISBUDPAR Kota Bukittinggi  
DISBUDPAR diharapkan dapat lebih selektif dalam penyusunan rencana

kerja serta pengeluaran kas untuk belanja agar tercipta keefektifan dan keefisienan dilingkungan DISBUDPAR dan Pemerintah Kota Bukittinggi.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun penelitian agar analisis terhadap kinerja anggaran belanja mendapatkan gambaran kinerja yang jelas. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambah rasio-rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja anggaran belanja.